

SKRIPSI

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KELURAHAN SAMATA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

AMRULLAH

D521 16 011



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KELURAHAN SAMATA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

AMRULLAH

D52116011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

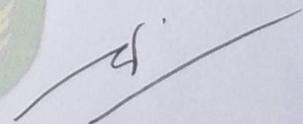
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA
NIDK. 8 8 0 3 5 6 0 0 1 8



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Ketua Program Studi,
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdulrahman Rasyid, S.T., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amrullah
NIM : D521 16 011
Prodi Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar
Permukiman di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 18 Februari 2021

Yang Menyatakan,


Amrullah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata terindah selain mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu**”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Pengambilan topik penelitian ini didasari oleh ketertarikan penulis terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang masih kurang terlaksana di masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pada dua karakteristik permukiman yang berbeda serta menganalisis pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap kondisi kebersihan prasarana dasar permukiman. Diharapkan pada masa yang akan datang penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan produk pembangunan.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk karya yang lebih baik ke depannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 18 Februari 2021

Amrullah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu untuk menerangi dunia. Selayaknya manusia biasa yang memiliki keterbatasan, dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Mustafa dan Ibu Sitti Hatijah) atas cinta, doa, waktu, pengorbanan, tenaga, pikiran, ilmu dan segalanya yang dilimpahkan kepada penulis tanpa ada batasan;
2. Saudara-saudara terkasih (Nur Awalia, S.Pd dan Awaluddin, S.Ak) atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengabdian kepada penulis;
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi atas bantuan materil selama masa perkuliahan melalui Program Beasiswa Bidikmisi;
4. Rektor Universitas Hasanuddin (Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A) atas kebijakan dan nasihat yang diberikan kepada penulis;
5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhammad Arsyad Thaha, M.T.) atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
6. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas kebijakan, dukungan dan bimbingnya kepada penulis;
7. Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (Prof. Dr. Ir. Shirley Wunas, DEA) atas ilmu, motivasi, waktu, tenaga dan khususnya untuk nilai kedisiplinan dan keramahan hati yang beliau ajarkan;
8. Dosen Pembimbing II (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin M.Si) atas nasihat, kasih sayang dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan kepada penulis;

9. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr-techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP.) yang tiada hentinya memberi motivasi, bimbingan, doa serta selalu mengingatkan penulis akan Allah SWT;
10. Dosen Penguji I (Bapak Ir. H. M. Fathien Azmy, M.Si) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Dosen Penguji II (Bapak Gaffar Lakatupa, S.T., M.Eng) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen *LBE* Perumahan dan Permukiman (Ibu Dr. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.) yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis;
13. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin atas ilmu, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis;
14. Seluruh staf administrasi dan pelayanan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos, Bapak Faharuddin, dan Bapak Syawalli) yang senantiasa dengan kemurahan hatinya membantu penulis dalam kelengkapan administrasi dari awal perkuliahan hingga saat ini;
15. Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Lurah Samata (Bapak Faisal Ichwan Azali, S.STP) beserta jajarannya atas ketulusan hati membantu penulis dalam melakukan observasi penelitian tugas akhir di Kelurahan Samata;
16. Teman-teman Angkatan RADIUS 2016 atas kebahagiaan, pengalaman, dan kebersamaan yang diukir selama empat tahun;
17. Teman-teman seperjuangan *Labo-Base Housing and Settlement* (Sri Hasnianti Rahman, S.T., Musdalifah, S.T., Novita Kumala Putri, S.T., Adinda Febriyanti, S.T., Amaliah Rizki Ramadhani JB, Nur Atria Yusuf, Syifa Beby Alisha K.R.I, Maudy Intan Astari, Rhara Dharmawan Noer, Dimas Ramadhandy Sekeon, Moh. Fachmi Anshary, Christoper Batara Tikupadang, Muh. Farid Usman, Rifat Alfasya, Muh. Fauzul Adhim Gazali dan Kak Aprizadly, S.T.) atas

bantuan, motivasi keceriaan, kebersamaan dan kemurahan hati untuk berbagi ilmu dengan penulis;

18. Teman-teman seperjuangan Kerja Praktek Profesi (Saskia Nabila Fatia Ananda, Suryandi Yusuf, Muhammad Fachrul Razi Taufik, S.T., dan Muhammad Fiqri Mahendra) atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya hingga titik akhir perjuangan Kerja Praktek Profesi;
19. Teman-teman Posko Kuliah Kerja Nyata Desa Sejahtera Mandiri Desa Bonto Tiro (Rosmiaty, Husnunnisa M, S.E., Puspa Protagonista Lukischa, S.H., Izmi Mukhlasinah, Risdianti, Yulinda, Muh. Khaeril Syam, dan Rahmat AR, S.AP.) atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharganya saat pelaksanaan KKN;
20. Senior Angkatan 2013, 2014, dan 2015 atas bimbingan, bantuan, dan arahnya mengenai dunia kampus maupun perkuliahan;
21. Teman-teman yang telah membantu dalam proses pengumpulan data (Fredy Bongga Tasik dan Andi Vicky Tri Andeka Syam) atas waktu dan bantuannya;
22. Keluarga besar HMPWK FT-UH atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga;
23. Keluarga besar Komunitas Kotata' atas dukungan dan motivasinya kepada penulis hingga akhir penulisan tugas akhir; dan
24. Seluruh masyarakat Kelurahan Samata atas dukungan, doa, serta keramahannya selama proses pengumpulan data.

Penulis menyadari ucapan terima kasih tak akan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait. Hanya untaian doa dapat dihaturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda atas segala bantuan. *Aamiin.*

Gowa, 18 Februari 2021



Amrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR PETA.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 <i>Output</i> Penelitian	6
1.6 <i>Outcome</i> Penelitian	6
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.8 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perumahan dan Permukiman	9
2.1.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman.....	9
2.1.2 Klasifikasi dan Tipe Perumahan.....	11
2.1.3 Prasarana Lingkungan Permukiman.....	13
2.2 Partisipasi Masyarakat	15
2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	17
2.2.3 Bentuk-bentuk Partisipasi.....	18

2.2.4 Derajat atau Tingkat Partisipasi Masyarakat	20
2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat ..	22
2.3 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).....	25
2.4.1 Penyelenggaraan Program Kotaku	26
2.4.2 Jenis dan Peranan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Program Kotaku	32
2.4 Pemeliharaan.....	39
2.5 Penelitian Terdahulu	42
2.6 Kerangka Konsep.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Jenis Data	47
3.4 Populasi dan Sampel	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Variabel Penelitian.....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.8 Defenisi Operasional.....	58
3.9 Kerangka Penelitian	60
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	61
4.1.2 Gambaran Umum Kelurahan Samata	65
4.1.3 Kondisi Prasarana Dasar Permukiman	67
4.2 Karakteristik Masyarakat	76
4.3 Analisis Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman	83
4.4 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	89
4.5 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman	93

BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
<i>CURRICULUM VITAE</i>	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein.....	20
Tabel 2.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi.....	25
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Pembagian Sampel.....	49
Tabel 3.2	Variabel dan Kebutuhan Data Penelitian.....	52
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	61
Tabel 4.2	Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun, Lingkungan, RT dan RW Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	63
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa	64
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.5	Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 4.6	Jumlah Responden berdasarkan Kelompok Usia.....	75
Tabel 4.7	Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.8	Jumlah Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan	79
Tabel 4.9	Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	81
Tabel 4.10	Jumlah Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan	82
Tabel 4.11	Jumlah Responden berdasarkan Lama Bermukim.....	83
Tabel 4.12	Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Berprogram	84
Tabel 4.13	Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Non-Program	85
Tabel 4.14	Frekuensi Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman.....	88
Tabel 4.15	Uji <i>Crosstab</i> Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Permukiman Berprogram	90
Tabel 4.16	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Berprogram	91
Tabel 4.17	Uji <i>Crosstab</i> Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Permukiman Non-Program	92
Tabel 4.18	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Non-program.....	93
Tabel 4.19	Varibel dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat	94

Tabel 4.20	Hasil Uji Multikolinearitas	95
Tabel 4.21	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser).....	96
Tabel 4.22	Koefisien Regresi.....	97
Tabel 4.23	Koefisien Regresi berdasarkan <i>Stepwise</i>	98
Tabel 4.24	ANOVA ^a	99
Tabel 4.25	Model <i>Summary</i>	100
Tabel 4.26	Rekapitulasi Hasil Analisis.....	100
Tabel 4.27	Persentase Faktor Pengaruh terhadap Tingkat Partisipasi	102
Tabel 4.28	Hasil Uji Multikolinearitas	105
Tabel 4.29	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser).....	105
Tabel 4.30	Koefisien Regresi.....	106
Tabel 4.31	Koefisien Regresi berdasarkan <i>Stepwise</i>	107
Tabel 4.32	ANOVA ^a	108
Tabel 4.33	Model <i>Summary</i>	108
Tabel 4.34	Rekapitulasi Hasil Analisis.....	109
Tabel 4.35	Persentase Faktor Pengaruh terhadap Tingkat Partisipasi	110
Tabel 4.36	Uji <i>Crosstab</i> Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ilustrasi Beberapa Kawasan	10
Gambar 2.2	Tahapan Kegiatan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa	27
Gambar 2.3	Posisi Perencanaan RPLP Kelurahan dalam Sistem Perencanaan Daerah.....	31
Gambar 2.4	Kerangka Konsep	44
Gambar 3.1	Model Pengujian.....	54
Gambar 3.4	Kerangka Penelitian.....	60
Gambar 4.1	Kondisi jalan pada permukiman yang telah terlayani program perbaikan lingkungan	68
Gambar 4.2	Kondisi permukaan jalan pada kawasan yang belum terlayani program.....	69
Gambar 4.3	(a) Drainase tertutup	69
Gambar 4.3	(b) Drainase terbuka	69
Gambar 4.4	Genangan yang terjadi akibat tidak adanya sistem drainase	70
Gambar 4.5	Proses pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata dan kelembagaan yang berperan.....	86
Gambar 4.6	Grafik <i>Probability Plot</i>	95
Gambar 4.7	Grafik <i>Probability Plot</i>	104

DAFTAR PETA

Peta 3.1	Peta Lokasi Penelitian	46
Peta 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa	62
Peta 4.2	Peta Administrasi Kelurahan Samata	66
Peta 4.3	Peta Kondisi Eksisting Prasarana Dasar Permukiman Kawasan dengan Program (RT 02 RW 04)	71
Peta 4.4	Peta Kondisi Eksisting Prasarana Dasar Permukiman Kawasan dengan Program (RT 02 RW 03)	72
Peta 4.5	Peta Kondisi Eksisting Prasarana Dasar Permukiman Kawasan dengan Program (RW 04)	73
Peta 4.6	Peta Kondisi Eksisting Prasarana Dasar Permukiman Kawasan Tanpa Program (RT 03 RW 05)	74
Peta 4.7	Peta Kondisi Eksisting Prasarana Dasar Permukiman Kawasan Tanpa Program (RT 04 RW 05)	75

**COMMUNITY PARTICIPATION IN MAINTENANCE
BASIC INFRASTRUCTURE HOUSING IN KELURAHAN SAMATA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Amrullah¹⁾, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin²⁾

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: amrullahmstf@gmail.com

ABSTRACT

Housing facilities and basic infrastructures supply for community in Gowa Regency filled by various programs, such as Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). This program aims to increasing basic infrastructure access and service in urban slum housing to support the implementation of livable, sustainable and productive urban housing, particularly in Kelurahan Samata. This research aims to identify the types of public participation, analyze the level of community participation and analyze the factors that affect the level of participation in maintenance base settlement in Kelurahan Samata by comparing two residential areas covered by the infrastructure improvement programs and residential areas that underserved environmental improvement program. This research was conducted on March to September 2020 in Kelurahan Samata. This research uses descriptive statistical analysis and simple linear regression analysis with SPSS 25. The result show that: 1) The form of public participation in two residential areas does not have a significant difference, is dominated by participation in the form of energy, each 51,92% and 50%; 2) Level of community participation in maintaining basic housing infrastructure in programmed areas is at level of citizen control participation, while in suburban areas with programs that are not implemented is at level of delegated power; and 3) Factor that affects level of participation in community by maintaining basic infrastructures on two residential areas using stepwise method on SPSS 25 affected by three variables, job, frequency, and motivation.

Keywords: *Participation, Maintenance, Infrastructure, Housing, Samata*

¹⁾ *Student of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University.*

²⁾ *Leacture of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University.*

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KELURAHAN SAMATA
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Amrullah¹⁾, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin²⁾

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: amrullahmstf@gmail.com

ABSTRAK

Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat Kabupaten Gowa dipenuhi melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, salah satunya di Kelurahan Samata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata dengan membandingkan dua kawasan permukiman, yakni kawasan permukiman yang telah terlayani dan kawasan permukiman yang belum terlayani program perbaikan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga September 2020 di Kelurahan Samata. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan SPSS 25. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 1) Bentuk partisipasi masyarakat pada dua kawasan permukiman tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yakni didominasi oleh partisipasi dalam bentuk tenaga, masing-masing 51,92% dan 50%; 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman pada kawasan berprogram berada pada tingkatan partisipasi kontrol masyarakat (*citizen control*), sedangkan pada kawasan permukiman yang belum terlayani program berada pada tingkatan partisipasi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*); dan 3) Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman pada dua kawasan permukiman secara signifikan berdasarkan uji regresi dengan metode *stepwise* pada SPSS 25 dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pekerjaan, frekuensi, dan motivasi.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemeliharaan, Prasarana, Permukiman, Samata

¹⁾ Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾ Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sampai saat ini terbilang masih belum merata, khususnya pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya wilayah di Indonesia yang masuk kategori tertinggal. Salah satu ciri suatu daerah dikatakan tertinggal adalah minimnya prasarana dasar permukiman di daerah tersebut. Macam-macam infrastruktur seperti; jalan, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya dianggap masih terbatas dan belum merata di semua wilayah Indonesia.

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (1991:19), prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari tujuh macam yaitu air bersih, drainase, air kotor/sanitasi, sampah, jalan kota, jaringan listrik dan jaringan telepon di mana tiap-tiap komponen mempunyai karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan jenis-jenis prasarana tersebut, maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh instansi pemerintah atau badan pengelola khusus karena membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang besar. Mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem pengolahan setempat, biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Lain halnya dengan prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat bukan individu-individu tertentu dan pengoperasian serta pemeliharannya sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada. Prasarana tersebut di antaranya adalah jalan dan drainase.

Partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi (Cohen dan Uphoff dalam Siti

Irene, 2011: 61). Pertama, partisipasi dalam membuat keputusan. Partisipasi ini bersifat sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama. Dibutuhkan kesepakatan dan suara mufakat karena bagaimana pun juga kegiatan terselenggara demi kepentingan bersama. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam implementasi/pelaksanaan. Partisipasi tersebut merupakan jenis partisipasi yang menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administratif dan koordinasi serta penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi ini merupakan partisipasi yang terkait dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah ada kesesuaian antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah direalisasikan.

Program pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat adalah program pembangunan yang setiap kegiatannya, melibatkan masyarakat. Hal ini telah disampaikan di atas, bahwa partisipasi masyarakat mencakup; kegiatan perencanaan atau pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Masyarakat menganggap bahwa ketika proyek pembangunan itu telah selesai dibangun, maka selesai pula keikutsertaan mereka dalam kegiatan program tersebut.

Anggapan tersebut merupakan anggapan yang keliru, karena yang lebih penting lagi dari keempat lingkup partisipasi masyarakat yang telah disampaikan di atas, adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah mereka kerjakan. Masyarakat kerap kali melupakan partisipasinya dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah diselesaikan. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri apabila prasarana yang telah diselesaikan dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan atau pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan pada prasarana dasar dinilai penting karena prasarana ini akan dinikmati oleh masyarakat, sehingga apabila prasarana ini mengalami kerusakan, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan suatu barang yang dibuat oleh manusia, apabila digunakan secara terus menerus akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Terdapat beragam kasus yang terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat prasarana yang sudah dibangun menjadi salah satu penyebab kerusakan prasarana itu dibiarkan. Hal itu merupakan suatu bukti bahwa masyarakat melupakan tanggung jawabnya untuk merawat prasarana yang telah dibangun.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat dalam memelihara prasarana yang telah dibangun, terutama prasarana yang dibangun melalui program pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kerusakan tersebut adalah prasarana yang sudah dibangun tidak dapat terjaga kualitasnya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap kondisi prasarana dasar di permukiman Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Kelurahan Samata merupakan kelurahan yang menjadi kawasan penanganan kumuh prioritas pada Program RP2KPKP tahun 2018-2019 yang dilaksanakan oleh Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat tingkat partisipasi masyarakat pada satu kawasan perumahan saja, akan tetapi membandingkan dua kawasan yang berada pada Kelurahan Samata.

Kedua kawasan tersebut, yaitu kawasan perumahan swadaya yang telah terlaksana program perbaikan prasarana dasar permukiman oleh Kotaku dan kawasan perumahan swadaya yang belum terlaksana program perbaikan prasarana dasar permukiman. Kawasan tersebut masing-masing terdiri atas; RT 02 RW 02, RT 02 RW 03, dan RW 04 yang merupakan lokasi dengan program Kotaku, serta RT 03 RW 05 dan RT 04 RW 05 yang merupakan lokasi tanpa program perbaikan prasarana dasar permukiman dalam hal ini Kotaku.

Permasalahan yang terjadi pada prasarana jalan dan drainase pada dua kawasan penelitian di Kelurahan Samata, merupakan suatu bukti bahwa kesadaran masyarakat untuk merawat prasarana dasar permukiman, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun dibangun secara swadaya masih kurang. Hal ini menguatkan teori yang disampaikan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012), bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan sering dilupakan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat tingkat partisipasi masyarakat dengan membandingkan dua kawasan yang memiliki karakteristik yang berbeda serta menganalisis pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap kondisi kebersihan prasarana dasar permukiman.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata?
3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata.

2. Menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di Kelurahan Samata.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar di Kelurahan Samata.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi civitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan, kajian ataupun tambahan pengetahuan bagi pihak pengembangan ilmu (institusi) dalam memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman;
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan inovasi, ide, dan beberapa alternatif arahan bagi para pihak yang berwenang untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan serta perbaikan dan peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman di lingkungannya; dan
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik yang tinggal di Kelurahan Samata agar senantiasa berpartisipasi terhadap pemeliharaan prasarana dasar permukiman sebagaimana yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana dasar lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi justru masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan pemeliharaan prasarana dasar tersebut.

1.5 Output Penelitian

Adapun *output* penelitian yang dihasilkan yaitu:

1. Laporan penelitian yang tersusun secara sistematis sebagai latihan pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota; dan
2. Jurnal, poster, *summary book*, dan peta prasarana dasar permukiman.

1.6 Outcome Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, *outcome* yang diharapkan yaitu:

1. Meningkatkan perhatian, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat, pemerintah dan akademisi terkait partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman; dan
2. Adanya arahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman yang tidak hanya berfokus pada kawasan yang telah terlayani program perbaikan saja.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi penelitian yaitu perumahan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun fokus penelitian terletak pada dua kawasan perumahan, yaitu kawasan perumahan swadaya yang telah terlaksana program perbaikan prasarana dasar permukiman oleh Kotaku dan kawasan perumahan swadaya yang belum terlaksana program Kotaku. Kawasan tersebut masing-masing terdiri atas; RT 02 RW 02, RT 02 RW 03, dan RW 04 yang merupakan lokasi dengan program Kotaku, serta RT 03 RW 05 dan RT 04 RW 05 yang merupakan lokasi tanpa program Kotaku.

1.7.2 Ruang Lingkup Substansi

Substansi pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan bentuk partisipasi masyarakat pemeliharaan prasarana dasar permukiman pada dua kawasan permukiman dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman;
2. Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman pada dua kawasan permukiman, berdasarkan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat menurut Teori Sherry Arnstein;
3. Penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar di permukiman Kelurahan Samata yang diuji menggunakan alat uji *Statistical Package for the Social Science* atau SPSS 25.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima, yaitu:

Bagian pertama memuat uraian latar belakang diadakannya penelitian, pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi civitas akademik, pemerintah, dan masyarakat, uraian mengenai ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bagian kedua memuat kajian literatur, berupa pengertian dan ketentuan-ketentuan pada perumahan, prasarana dasar permukiman yang berfokus pada prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat, uraian mengenai lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan, uraian bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan program Kotaku.

Bagian ketiga menjelaskan mengenai proses penelitian yang dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penjabaran definisi operasional, serta pemaparan kerangka penelitian.

Bagian keempat memuat tentang gambaran umum wilayah studi dan pemaparan data yang telah dikumpulkan, pengolahan data, serta analisis yang dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pertama.

Bagian kelima memuat kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Terdapat pula uraian saran yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dasar permukiman. Terdapat pula saran yang diajukan untuk para peneliti di masa mendatang yang hendak mengambil permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa pengertian perumahan adalah kelompok rumah-rumah yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sementara pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat melakukan kegiatan yang mendukung penghidupan.

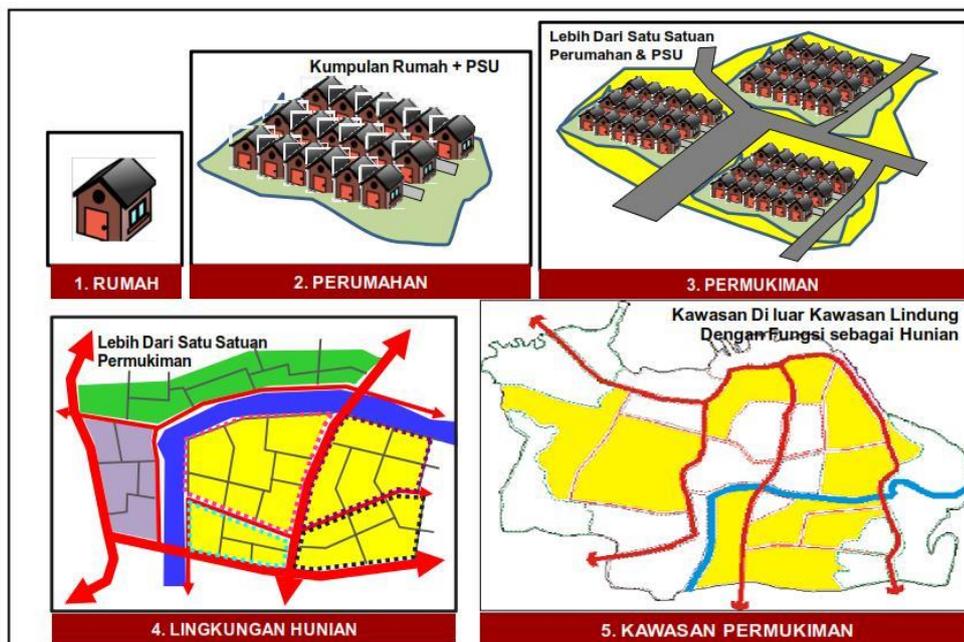
Kebijakan tentang perumahan dan permukiman Indonesia tahun 2000-2020 antara lain adalah lokasi perumahan dikembangkan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan penyebarannya, tata guna tanah, kesehatan lingkungan, tersedianya fasilitas sosial, serta keserasian dengan lingkungan (Kemenpera, 2007). Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, selain untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar melalui penataan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, pengembangan perumahan dan permukiman juga mempunyai tujuan untuk memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang rasional serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain.

Berdasarkan undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan beberapa hal penting yang terkait dengan pengadaan perumahan di Indonesia, yaitu:

1. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati/menikmati/ memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;

2. Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana, menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan secara bertahap; dan
3. Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan bimbingan, pemberian bantuan, kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Adapun ilustrasi beberapa kawasan dapat ditinjau pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Ilustrasi Beberapa Kawasan
 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2007

Menurut Komarudin (1996), perumahan dan permukiman merupakan tempat aktivitas yang memanfaatkan ruang terbesar dari suatu kawasan budidaya. Pengelolaan pembangunan perumahan harus memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung serta keterpaduannya dengan aktivitas lain. Pada kenyataannya hal tersebut sering terabaikan sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam mendukung suksesnya perkembangan kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya perencanaan dan perancangan pembangunan perumahan yang kontributif terhadap tujuan penataan ruang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, tampak bahwa aspek perumahan dan permukiman sangat terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Dimana lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana, dan sarana lingkungan yang terstruktur. Sementara itu, prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berbagai fakta menunjukkan banyaknya permukiman yang dibangun tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai kelengkapan fasilitas, walaupun ada kualitasnya sangat rendah atau tidak berfungsi dengan baik.

2.1.2 Klasifikasi dan Tipe Perumahan

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman dapat dilihat dari klasifikasi permukiman dan tipe permukiman. Berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi dan tipe permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara menjelaskan bahwa berdasarkan luasannya, perumahan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: tipe rumah mewah, tipe rumah menengah, dan tipe rumah sederhana. Lebih jauh dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tipe rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling lebih dari $> 600 \text{ m}^2$ atau biaya pembangunan per m^2 diatas harga satuan tertinggi per m^2 untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas A yang berlaku.

Tipe rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas *kavling* antara $200 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$ atau biaya pembangunan per m^2 di atas harga satuan tertinggi per m^2 untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C sampai A yang berlaku. Sementara tipe rumah sederhana adalah rumah yang dibangun di

atas tanah dengan luas *kavling* antara 54 m² sampai 200 m² atau biaya pembangunan per m² di atas harga satuan tertinggi per m² untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang berlaku. Tipe permukiman dapat dibedakan menjadi dua tipe permukiman, yaitu:

a. Tipe permukiman berdasarkan waktu hunian

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari (rumah tenda penduduk pengembara), dihuni hanya untuk beberapa bulan (kasus perumahan peladang berpindah secara musiman), dan hunian hanya untuk beberapa tahun (kasus perumahan peladang berpisah yang tergantung kesuburan tanah). Tipe permanen, umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat permukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.

b. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan non-fisik

Pada hakikatnya permukiman memiliki struktur yang dinamis, setiap saat dapat berubah dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar, karena perubahan disertai oleh pertumbuhan. Sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar, secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi dan kepentingannya.

Sehingga, jika tempat terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis suatu kota besar maupun kecil akan menghindari ke-*mandeg*-an, kota akan berkembang baik ke arah vertikal maupun horizontal, fungsi baru berkembang dan fungsi lama menghilang, pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula. Pada akhirnya terpenting untuk dipertimbangkan bahwa semua permukiman memiliki jati diri masing-masing secara khas. Baik tanpa fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur dan perencanaan jalan pada setiap permukiman memiliki keunikan sendiri.

Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat, ciri-ciri permukiman di kota-kota yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

- a. Permukiman yang direncanakan dengan baik (*planned*) adalah suatu permukiman yang dibangun dengan baik, teratur, serta memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas yang baik;
- b. Permukiman tanpa direncanakan dahulu (*unplanned*) adalah suatu permukiman yang tumbuh dengan pola yang tidak teratur dan minimnya fasilitas sarana prasarana permukiman yang dimilikinya. Permukiman ini sering disebut juga dengan permukiman yang tidak teratur; dan
- c. Permukiman yang tidak sepenuhnya di rencanakan dengan baik, yaitu suatu permukiman yang tumbuh dan berkembang dengan jalan-jalan dan rumah di lapis pertama dengan baik, namun di lapis kedua tumbuh permukiman tidak teratur. Permukiman ini sering disebut dengan permukiman setengah teratur.

Pada permukiman yang telah direncanakan, pola-pola permukimannya terbentuk dari pola-pola jalan yang dibuat berdasarkan klasifikasi jalan lingkungannya dan perbedaan klasifikasi jalan sering kali menunjukkan adanya perbedaan tingkat sosial penghuni atau aktivitas yang dibentuk di kawasan tersebut. Adapun permukiman yang tidak teratur terbagi dalam dua tipe, yaitu tipe kampung dan tipe perumahan liar. Perbedaan keduanya terletak pada status legalitas baik tanah maupun bangunan. Selain itu di perkotaan dikenal adanya permukiman kumuh, yaitu berupa kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang tinggi.

2.1.3 Prasarana Lingkungan Permukiman

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana lingkungan atau sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang;
- b. Mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur;
- c. Jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan
- d. Jaringan saluran air hujan untuk pemantusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah atau kawasan pada suatu waktu tertentu, keseimbangan di antara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan di mana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran aktivitas dari masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat prasarana. Sementara itu upaya-upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan prasarana dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (dalam Tasrif, 2013) prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari tujuh macam yaitu air bersih, drainase, air kotor/sanitasi, sampah, jalan kota, jaringan listrik dan jaringan telepon di mana tiap-tiap komponen mempunyai karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan jenis-jenis prasarana di atas maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh instansi Pemerintah atau badan pengelola khusus karena

membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang besar. Dan mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem pengolahan setempat, biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

Adapun prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat bukan individu-individu tertentu dan pengoperasian serta pemeliharannya sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada. Jenis-jenis prasarana tersebut dapat ditinjau pada uraian berikut:

- a. Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena sebenarnya masyarakatlah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat,
- b. Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan, dan
- c. Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, baik secara sukarela maupun atas dorongan tertentu. Bornby (dalam Erwin, 2015) mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Beal (dalam Erwin, 2015) mengemukakan bahwa partisipasi, terlebih lagi partisipasi yang tumbuh karena suatu pengaruh atau tumbuh dengan rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat menunjukkan sebagai proses perubahan

sosial eksogen. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato, bahwa karakteristik dari proses partisipasi adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk jaringan sosial yang dapat mewujudkan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, partisipasi sebagai proses akan membentuk jaringan sosial baru yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Adapun definisi masyarakat menurut Koentjaraningrat (dalam Erwin, 2015) merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas manusia yang melakukan interaksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang berjalan secara berkelanjutan dan terikat pada identitas kebersamaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka masyarakat diartikan sebagai individu-individu yang saling berinteraksi bersama, dan dijalani secara berkelanjutan dengan didasari pada aturan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Berdasarkan definisi tersebut, di dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu ikatan yang sudah disepakati bersama, seperti adanya norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto (dalam Erwin, 2015) bahwa ciri-ciri masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Partisipasi masyarakat adalah adanya keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi, menurut Adi (dalam Erwin, 2015).

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa masyarakat diajak untuk terlibat dalam kegiatan proses pengambilan keputusan, supaya mereka dapat bertindak dengan mandiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah atau

pembuat kebijakan. Masyarakat yang mandiri, diharapkan apabila terdapat masalah di kehidupan masyarakat, masyarakat dapat dengan sendirinya mengatasi masalah tersebut, sehingga masalah itu pun bisa terselesaikan secara efisien.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, baik secara sukarela maupun atas dorongan tertentu. Yadav (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012) mengemukakan empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, dan sebagian besar merupakan pencerminan dari kebutuhan para elite yang berkuasa, sehingga hal ini kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di wilayah setempat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan, maka pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, karena hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk sumbangsih lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Jadi tidak tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dapat dilakukan dengan

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan juga peran serta dari aparat pembangunan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Selain keempat lingkup partisipasi masyarakat yang telah dipaparkan, yang sering dilupakan dalam kegiatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam memelihara proyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pemeliharaan produk pembangunan dinilai penting karena dapat memperpanjang usia dari produk pembangunan tersebut. Produk pembangunan yang telah ada dapat terus dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

2.2.3 Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp (dalam Mardikanto dan Subiato, 2012) bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Menurut Keith Davis (dalam Mardikanto dan Subiato, 2012), dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa; pikiran, tenaga, barang dan uang. Untuk lebih terperinci, berikut penjelasan dari bentuk-bentuk partisipasi tersebut. Pertama, adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, merupakan bentuk

partisipasi yang memberikan ide atau gagasan dalam setiap kegiatan pembangunan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat musyawarah warga atau kegiatan rapat program pembangunan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat musyawarah warga atau kegiatan rapat program pembangunan. Tujuan partisipasi dalam bentuk pikiran ini diharapkan agar dapat menjadi penyempurna dilaksanakannya perencanaan kegiatan pembangunan, sehingga hasil kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, bentuk partisipasi seperti ini biasanya terjadi pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan. Gotong royong menjadi hal yang sering ditemukan di masyarakat, selain dapat mempercepat pengerjaan, juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Pada literatur lain terdapat pula bentuk partisipasi dalam bentuk keterampilan. Keterampilan dalam hal ini merupakan keahlian khusus masyarakat dalam suatu hal spesifik seperti keahliannya dalam bidang pertukangan. Akan tetapi peneliti menggabungkan bentuk partisipasi tersebut ke dalam partisipasi dalam bentuk tenaga karena bentuk pelaksanaannya yang juga terjun langsung ke lapangan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. Barang merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan atau suatu hal yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Seperti partisipasi masyarakat dengan memberikan bahan material (batu, pasir, semen) yang dapat menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur. Atau contoh lain partisipasi masyarakat dengan memberikan konsumsi kepada tukang yang sedang mengerjakan pembangunan.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Secara umum, uang diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa. Dalam pelaksanaan program pembangunan, uang dapat digunakan untuk membayar jasa para pekerja ahli yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, selain itu banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang. Masyarakat dapat menggunakannya untuk pembelian bahan material pembangunan (batu, pasir, semen), menyediakan konsumsi bagi para pekerja, dan dapat membantu melancarkan kegiatan pembangunan. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan,

masyarakat dapat memilih bentuk partisipasi yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.

2.2.4 Derajat atau Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam menilai partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut teori Sherry Arnstein (1971). Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan sejauh mana kekuatan masyarakat dalam menentukan rencana atau program. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat: (1) Tidak partisipatif (*non-participation*); (2) Derajat semu (*degrees of tokenism*); dan (3) Kekuatan masyarakat (*degrees of citizen powers*). Tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arnstein dapat ditinjau pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein

Derajat Partisipasi	Tingkatan Partisipasi
Tidak Partisipasi (<i>Non-participation</i>)	Manipulasi (<i>manipulation</i>)
	Terapi (<i>therapy</i>)
Partisipasi Semu (<i>Tokenism</i>)	Pemberian Informasi (<i>informing</i>)
	Konsultasi (<i>consultation</i>)
	Penentraman (<i>placation</i>)
	Kemitraan (<i>partnership</i>)
Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)	Pendelegasian Kekuasaan (<i>delegated power</i>)
	Kontrol Masyarakat (<i>citizen control</i>)

Sumber: Arnstein (dalam Bowo Adrianto, 2006)

Adapun tingkatan partisipasi yang telah dipaparkan di atas dapat ditinjau secara lebih detail pada uraian sebagai berikut:

a. Manipulasi (*manipulation*)

Pada tingkat partisipasi ini dapat diartikan bahwa relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog dari masyarakat. Tujuan sebenarnya bukan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi untuk mendidik atau memulihkan partisipan. Dengan kata lain, masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tetapi hadir dalam forum.

b. Terapi (*therapy*)

Pada tingkat ini, dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan, masyarakat diperlakukan seperti pada proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka. Pada tingkatan ini telah ada komunikasi, namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

c. Pemberian Informasi (*informing*)

Pada jenjang ini, mulai terlihat komunikasi akan tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*).

d. Konsultasi (*consultation*)

Pada tingkat partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tetapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

e. Penentruman (*placation*)

Pada level ini, komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.

f. Kemitraan (*partnership*)

Pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar pada tingkat partisipasi ini. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun *monitoring* dan evaluasi. Diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan.

g. Pendelegasian Kekuasaan (*delegated power*)

Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

h. Kontrol Masyarakat (*citizen control*)

Dalam tingkat partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

Tingkatan ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat *tokenisme*, di mana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Tiga tingkatan akhir dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Wahyuni, 2016) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih

mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan atau latar belakang Pendidikan seseorang dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, dan suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (dalam Firmansyah, 2009), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat;
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;

- c. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- i. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mimi Arifin (2020), faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat lebih besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sementara faktor internal sendiri tidak memiliki korelasi dengan partisipasi masyarakat. Faktor eksternal tersebut terdiri atas empat poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;

- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Pernyataan berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Tri Wahyuni (2016) yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal memiliki keseimbangan antar keduanya pada setiap tahap pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi karena karakteristik masyarakat dan lingkungan sosial pada setiap kawasan atau lokasi penelitian berbeda-beda. Berdasarkan paparan dari beberapa penelitian terdahulu, berikut penulis simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang diuraikan dalam faktor internal dan faktor eksternal pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Usia	1. Frekuensi
2. Jenis kelamin	2. Motivasi
3. Pendidikan	
4. Pekerjaan	
5. Penghasilan	
6. Lama bermukim	
7. Jumlah penghuni	

Sumber: Penulis, 2020

2.3 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (*World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB* dan *Islamic Development Bank-IsDB*). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

2.4.1 Penyelenggaraan Program Kotaku

Seperti yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tahun 2019, program Kotaku di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat

kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif. Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler. Secara detail tahapan kegiatan di tingkat kelurahan/desa dapat dilihat pada Gambar 2.2, sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018

a. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan kolaborasi dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu:

1) Sosialisasi awal dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

Tahapan sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program KOTAKU.

2) Pembentukan/ Penguatan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).

TIPP merupakan tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahan/Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa

Pokja yang minimal sesuai dengan tujuh indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- 1) Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di Kecamatan maupun di Kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan TIPP;
- 2) Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa;
- 3) Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD/Desa, yang terkait dengan program KOTAKU.

b. Tahapan Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (*livelihood*), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data *baseline* 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah *livelihood*, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya.

c. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah APBN/Bantuan dana investasi, APBD, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- 2) Kegiatan ekonomi terdiri dari:
 - a) Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)
 - b) Kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).
- 3) Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari:
 - a) Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: i) pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; ii) sosialisasi menerus; iii) Pelatihan */on the job training vocational*; iv) dan lain-lain;
 - b) Pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat;
 - c) Pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d) Kegiatan pemasaran program permukiman; dan
 - e) Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

d. Tahapan Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, Pemda dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi:

1) Pengembangan Kelembagaan

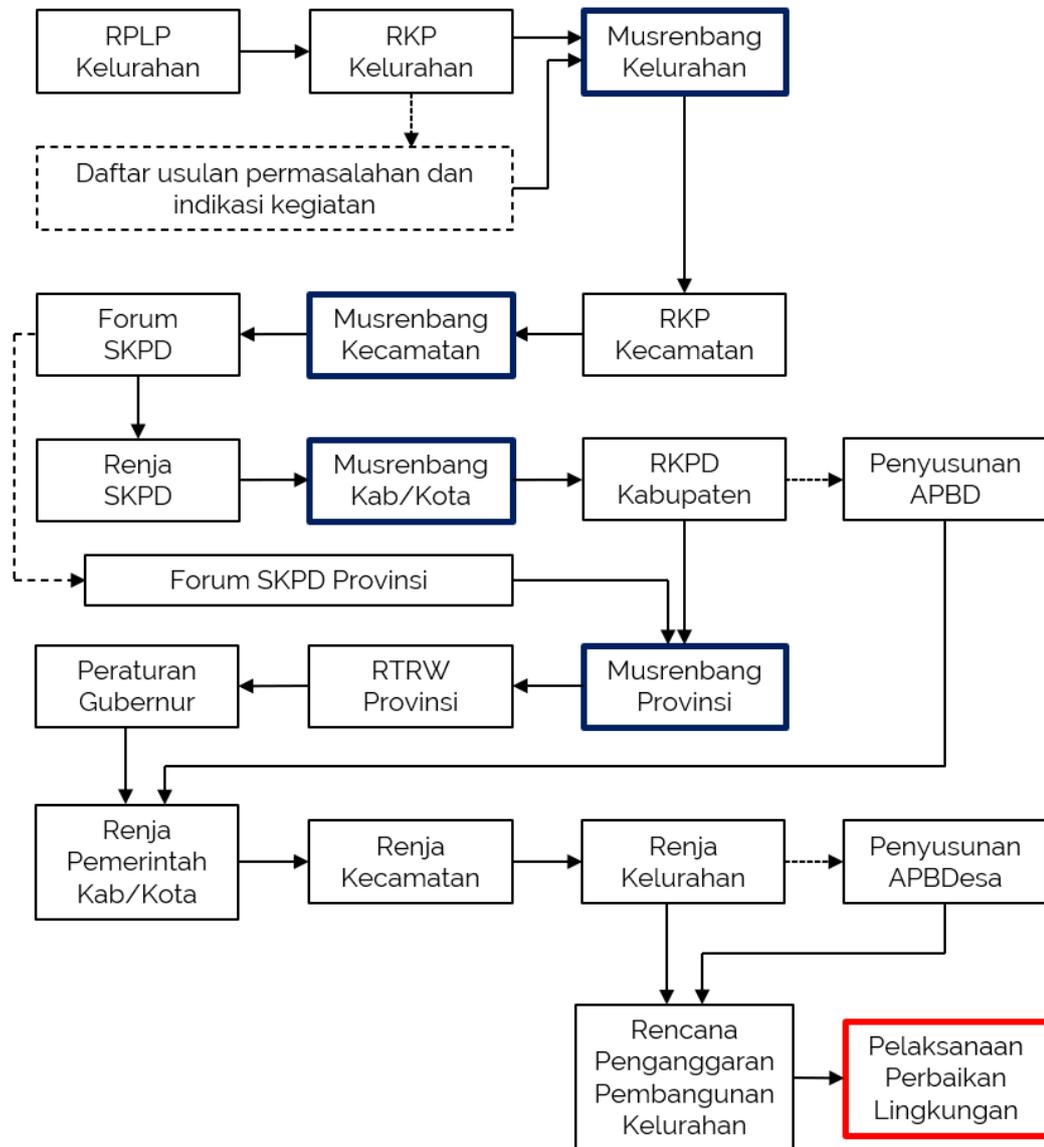
Kegiatan pengembangan kelembagaan merupakan penguatan terhadap kelembagaan yang ada atau membangun kelembagaan baru untuk mengawal seluruh proses penataan permukiman dan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan/desa, dari membangun gagasan atau prakarsa sampai dengan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Kelembagaan di tingkat masyarakat perannya menjadi sangat penting dalam rangka penanganan kumuh, seperti penilik sampah, penilik bangunan, penilik kebakaran dan sebagainya.

2) Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Integrasi perencanaan dan penganggaran daerah bertujuan untuk memastikan target penanganan permukiman kumuh menjadi 0 persen pada tahun berjalan, serta memiliki hunian yang layak dan berkelanjutan. Proses integrasi fokusnya pada skenario penanganan permukiman. Kebutuhan pembiayaan penanganan permukiman kumuh ini sangat besar dan kemampuan anggaran pusat dan daerah juga terbatas, maka diperlukan investasi yang terdapat dalam RPLP dipasarkan kepada swasta dan kelompok peduli lainnya untuk ikut berkontribusi dalam menangani permukiman kumuh perkotaan, termasuk menggalang sebesar mungkin swadaya masyarakat. Keswadayaan masyarakat merupakan komponen utama dalam penganggaran program permukiman.

Kedudukan dokumen perencanaan permukiman tingkat kelurahan (RPLP) perlu diintegrasikan ke dalam Renstra Kecamatan, agar dapat masuk ke dalam proses Musrenbang Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan (Renja). Dari hasil kesepakatan di tingkat Kecamatan selanjutnya diajukan ke Musrenbang kabupaten/Kota sebagai landasan untuk masuk dalam proses penyepakatan Rencana penganggaran pembangunan kelurahan (RKP). Proses integrasi ini dipandang perlu dilakukan sesuai jadwal sistem perencanaan pembangunan daerah.

Melalui proses integrasi ini tentunya memberikan peluang lebih besar implementasi perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat Kelurahan mendapatkan pembiayaan pembangunan dari APBD maupun dari sumber-sumber pembiayaan lain secara kolaborasi. Posisi perencanaan RPLP secara jelas disajikan pada Gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3 Posisi Perencanaan RPLP Kelurahan dalam Sistem Perencanaan Daerah

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018

2.4.2 Jenis dan Peranan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Program Kotaku

Tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tahun 2019, pelaku pelaksanaan program Kotaku tingkat kelurahan/desa terdiri dari Camat dan perangkatnya, Lurah/Kepala Desa dan perangkatnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Lingkungan-Sosial-Kuangan (UPL-UPS-UPK), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), Relawan, Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP), dan masyarakat. UPL-UPS-UPK dibentuk oleh BKM, sedangkan TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM, relawan, dan kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Mengingat dalam penanganan kumuh merupakan persoalan yang sulit (*complicated*) dan rumit (*complex*) maka peran-peran lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan/desa di atas, perlu duduk bersama dalam suatu forum kolaborasi yang fokus dalam penanganan kumuh maupun persoalan-persoalan permukiman lainnya. Forum kolaborasi ini merupakan forum di tingkat kelurahan/desa, bersifat cair dan fleksibel bukan merupakan lembaga yang harus dibentuk, tetapi merupakan kumpulan lembaga di tingkat kelurahan/desa dan atau perseorangan/relawan yang difungsikan sebagai forum. Adapun Relawan Teknik dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh masyarakat (KSM/panitia pelaksana) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun peran umum pelaku dalam penyelenggaraan Kotaku di tingkat kelurahan/desa dapat dilihat pada pemaparan berikut:

- a. **Camat dan pemerintah kecamatan**, memiliki peran sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

- 2) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
- 3) Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM;
- 4) Memastikan RPLP kedalaman rencana teknis masuk dalam Renstra/Renja Kecamatan; dan
- 5) Melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang ada dalam RPLP.

b. **Lurah/Kepala Desa dan pemerintah kelurahan/desa**, memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan KOTAKU di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar bersama Lembaga kelurahan/desa (BPD, PKK, LPM, dll) sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;
- 2) Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa;
- 3) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan permukiman dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan program;
- 4) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan beragam program Permukiman tingkat kelurahan/desa;
- 5) Memonitor pengelolaan dampak sosial dan lingkungan bersama BKM/LKM difasilitasi oleh fasilitator serta mengarsipkan dokumen terkait;
- 6) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan program; dan
- 7) Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya;

- 8) Memastikan RPLP dengan kedalaman rencana teknis masuk dalam RPJM/RKP Desa atau Renstra/Renja Kecamatan;
- 9) Memastikan adanya alokasi APBDES/APBD untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan di RPLP;
- 10) Melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak bersama Lembaga kelurahan/desa untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang ada dalam RPLP;
- 11) Bersama BKM/LKM, memastikan seluruh rencana dalam RPLP/RTPLP dan AB dapat terlaksana sesuai rencana; dan
- 12) Bersama BKM/LKM, melaksanakan program menerus untuk penataan Permukiman (peningkatan kapasitas, monev, operasional dan pemeliharaan (OP) serta pengembangan dan inovasi).

c. **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**, memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Bertindak sebagai motor penggerak untuk senantiasa menggali dan melembagakan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bersifat universal, prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, serta prinsip Tridaya termasuk motor penggerak berfungsinya forum kolaborasi penanganan permukiman;
- 2) Menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat warga dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan persoalan permukiman (termasuk penanganan kumuh) secara mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Bertindak sebagai forum pengambilan keputusan dan kebijakan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program termasuk penanggulangan kemiskinan dan permukiman;
- 4) Menyusun rencana kerja BKM/LKM dalam pelaksanaan kegiatan KOTAKU;
- 5) Bersama-sama dengan lurah/kepala desa memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan KOTAKU di tingkat kelurahan/desa;
- 6) Menetapkan kebijakan serta mengawasi pemanfaatan dana bantuan KOTAKU dan dana-dana sumber lainnya bersamasama pemerintahan

kelurahan/desa, yang sehari-hari dikelola unit-unit pelaksana yang dibentuk BKM/LKM sesuai kebutuhan;

- 7) Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
- 8) Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;
- 9) Memonitor pengelolaan dampak sosial dan lingkungan bersama lurah/kades difasilitasi oleh fasilitator serta mengarsipkan dokumen terkait;
- 10) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan lurah/kepala desa, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan program;
- 11) Bersama dengan lurah/kepala desa dan Lembaga kelurahan/desa melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan penataan Permukiman yang ada dalam RPLP;
- 12) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan/desa, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E;
- 13) Bersama lurah/kades, memastikan seluruh rencana dalam RPLP/RTPLP dan AB dapat terlaksana sesuai rencana; dan
- 14) Bersama lurah/kades, melaksanakan program menerus untuk penataan Permukiman (peningkatan kapasitas, monev, OP serta Pengembangan dan inovasi).

d. **Lembaga kelurahan/desa (BPD, PKK, LPM, dll)** memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama dengan Lurah/Kepala Desa dan BKM/LKM memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan KOTAKU di tingkat kelurahan/desa;
- 2) Bersama dengan lurah/kepala desa dan BKM/LKM melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak untuk kerjasama pelaksanaan kegiatan penataan permukiman yang ada dalam RPLP;

- 3) Menyusun kebijakan melalui Perdes atau peraturan lainnya dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.
- e. **Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)** memiliki peran sebagai berikut:
- 1) Memfasilitasi seluruh tahap kegiatan Perencanaan KOTAKU;
 - 2) Memfasilitasi membangun Visi Permukiman dan Refleksi Perkara Kritis;
 - 3) Melakukan pendataan di tingkat kelurahan/desa maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;
 - 4) Bersama BKM/LKM dan Lurah/Kades difasilitasi Tim Faskel/Korkot dapat mencari bantuan teknis mengenai perencanaan Permukiman dari beragam pihak;
 - 5) Memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah dengan para pihak untuk beragam kegiatan penataan Permukiman;
 - 6) Memfasilitasi kajian-kajian pemetaan swadaya di masyarakat
 - 7) Menyusun dokumen RPLP dibantu oleh tenaga ahli pendamping dan fasilitator;
 - 8) Melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan
 - 9) Melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota;
 - 10) Bersama UPL dan BKM/LKM dan lurah/kades memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dalam RPLP.
- f. **Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)** memiliki peran sebagai berikut:
- 1) Membangun dinamika kelompok dari mulai tunas, tumbuh sampai kembang;
 - 2) Melakukan kegiatan KSM sesuai dengan rencana kerja KSM;
 - 3) Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/Sosial/Ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
 - 4) Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2KKP secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan
 - 5) Khusus KSM yang menangani kegiatan infrastruktur, memiliki peran:

- a) menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Pra Pelaksanaan Kegiatan (MP2K);
- b) melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K;
- c) membangun prasarana dengan kualitas baik, bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan teknis konstruksi;
- d) membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum;
- e) membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan untuk diserahkan kepada BKM/LKM, dan mengarsipkannya;
- f) melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung;
- g) mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- h) aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatan.

g. **Unit Pengelola Lingkungan (UPL)**, memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua tim pelaksana (KSM Permukiman) termasuk praktek lapangan;
- 3) Memverifikasi administrasi pencairan/pemanfaatan dana kepada KSM Permukiman;
- 4) Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM Permukiman termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan;
- 5) Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM Permukiman untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaian kegiatan lapangan;

- 6) Bersama Faskel Teknik dan KSM Permukiman melakukan Opname pekerjaan dilapangan;
- 7) Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM/ Panitia (Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk foto dokumentasi) dan melaporkannya kepada coordinator BKM/LKM;
- 8) Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis (Bangunan berkualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya);
- 9) Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur melakukan verifikasi proposal KSM/ Panitia (termasuk membuat Berita Acara Verifikasi); dan
- 10) Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur dan pihak KSM/ Panitia melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2));

h. **Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)**, memiliki peran seperti:

- 1) Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang mencakup mekanisme pelaksanaan O&P serta pendanaannya;
- 2) Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya;
- 3) Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM); dan
- 4) Melaporkan kegiatan O&P termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa.

i. **Relawan**, memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan KOTAKU secara partisipatif;
- 2) Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb; dan
- 3) Mitra kerja Lurah/Kepala Desa dan BKM/LKM dalam kegiatan penataan Permukiman melalui KOTAKU.

- j. **Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP)**, memiliki peran sebagai berikut:
- 1) Mendampingi masyarakat dalam proses penyusunan RPLP dengan keahlian teknisnya sebagai perencana spasial;
 - 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
 - 3) Bersama BKM/LKM, TIPP, Lurah, dan fasilitator, memastikan bahwa komunitas benar-benar terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; dan
 - 4) Memastikan RPLP disusun melalui proses partisipatif, berkualitas baik dan selaras dengan RP2KP-KP.

2.4 Pemeliharaan

Suatu barang yang dibuat oleh manusia, sejatinya apabila digunakan terus menerus akan mengalami penurunan kualitas terhadap barang itu sendiri, bahkan terjadi kerusakan. Suatu barang yang mengalami kerusakan, maka tidak dapat digunakan seperti barang yang masih baru. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan agar barang tersebut dapat bertahan lama, sehingga kualitas penggunaan terhadap barang tersebut dapat bertahan lama, sehingga kualitas penggunaan terhadap barang tersebut tetap terjaga dengan baik.

Seperti yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Operasional dan Pemeliharaan Program Kotaku Tahun 2018, Peningkatan kualitas permukiman kumuh tidak dapat hanya dilakukan dengan membangun infrastruktur saja, tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya pencegahan tumbuhnya kumuh baru. Kegiatan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan, di samping untuk menjaga kualitas infrastruktur agar berfungsi dengan baik, juga merupakan kegiatan dalam upaya pencegahan tumbuhnya kumuh baru. Kegiatan operasi/pemanfaatan adalah cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungannya. Sedangkan pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama.

Dengan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan, dapat dihindarkan perbaikan atau rehabilitasi secara besar-besaran. Kegiatan O&P infrastruktur sebagai pelayanan umum tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri tetapi harus diorganisasikan pada tataran pemerintahan dan masyarakat. Pada kegiatan perbaikan lingkungan, penyelenggaraan O&P prasarana dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang dibentuk oleh BKM dan beranggotakan wakil-wakil masyarakat selaku pemanfaat prasarana tersebut. KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh. KPP juga sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Berdasarkan lingkup partisipasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya, maka masyarakat dapat berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan berupa pikiran, tenaga, barang, dan uang. Oleh karena itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut juga dapat diberlakukan dalam kegiatan pemeliharaan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Berikut penjelasan penerapan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan.

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengemukakan ide dan gagasannya dalam kegiatan pemeliharaan produk pembangunan, dalam hal ini adalah prasarana berupa jalan, drainase, dan prasarana pembuangan sampah. Ide dan gagasan yang disampaikan masyarakat dapat berupa ide tentang penanganan terhadap kerusakan prasarana, maupun memberikan sumbang saran untuk bahan material, serta perencanaan keuangan yang akan digunakan untuk mengganti bagian jalan yang rusak.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, atau dalam pengerjaan perbaikan prasarana yang rusak. Masyarakat dapat membantu dalam kegiatan perbaikan prasarana, apabila terjadi kerusakan terhadap prasarana tersebut. Banyaknya tenaga yang terlibat di dalam kegiatan perbaikan tersebut, maka dapat memperlambat kegiatan perbaikan, sehingga

prasarana jalan itu pun dapat segera digunakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. Barang merupakan sesuatu yang memiliki wujud. Hal ini dapat berupa: batu, pasir, dan semen. Masyarakat dapat menyumbangkan partisipasinya dengan memberikan bahan material tersebut, yang akan digunakan untuk pemeliharaan jalan maupun untuk memperbaiki prasarana yang rusak.
- d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Pada umumnya uang merupakan sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian jasa atau barang. Masyarakat akan membutuhkan uang tersebut untuk melakukan pembelian terhadap barang-barang yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan prasarana. Selain digunakan untuk pembelian barang, uang dapat digunakan untuk membayar jasa dari tenaga yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan perbaikan prasarana tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
1.	Jeffrey Arrahman P dan Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso	Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Lingkungan Fisik Permukiman (Studi Kasus: Permukiman Kampung Kecamatan Rungkut)	Analisis Deskriptif, Analisis Delphi, dan Analisis Triangulasi	Karakteristik masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan teori Arnstein, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan fisik permukiman pada Permukiman Kampung Kecamatan Rungkut.	Jurnal Institut Teknologi Sepuluh November (ITS, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota) Tahun 2012
2.	Winfrit Kasse, Willy Tri Hardianto, Dewi Citra Larasati	Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Kawasan Perumahan dengan Kawasan Perkampungan dalam Perencanaan Pembangunan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Perbandingan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan yang tinggal di perkampungan dalam perencanaan pembangunan desa.	Jurnal JISIP Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI, Program Studi Ilmu Administrasi Negara) Tahun 2017
3.	Sri Handayani	Partisipasi Masyarakat Kampung Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Analisis Deskriptif Korelatif dan Analisis Jalur	Karakteristik masyarakat kampung kota, persepsi, motivasi, dan tingkat partisipasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan, tingkat kebutuhan akan rumah dan lingkungan permukiman pada masyarakat, dan strategi yang tepat untuk menggerakkan masyarakat kampung kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan.	Tesis Institut Pertanian Bogor (IPB, Program Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan) Tahun 2008

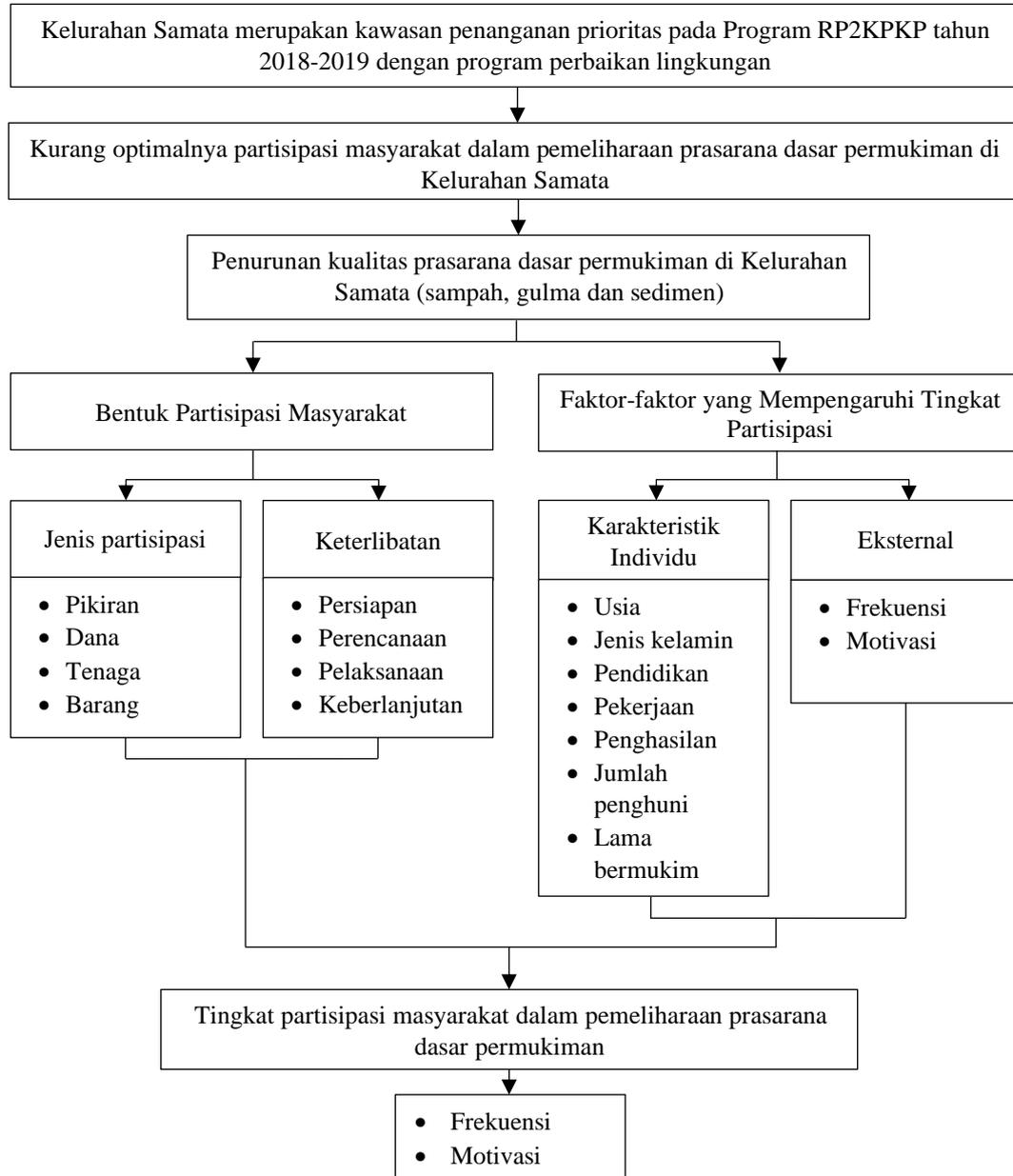
Lanjutan Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
4.	Yayuk Tri Wahyuni, Asnawi Manaf	Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, dan keberlanjutan program Gerak Bersemi	Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota (UNDIP, Biro Penerbit Planologi) Tahun 2016
5.	Yulianti	Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan dan Pemeliharaan lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur	Analisis Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Batu Sembilan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, mata pencaharian, penghasilan, dan suku/etnis.	Tesis Universitas Diponegoro (UNDIP, Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota) Tahun 2006

Sumber: Yulianti, 2006; Handayani, 2008; Arrahman, 2012; Wahyuni, 2016; Kasse, 2017; Rangkuman penelitian oleh penulis, 2020

2.6 Kerangka Konsep

Alur pikir mengenai konsep penelitian dapat ditinjau pada skema yang ditampilkan pada Gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Konsep

Sumber: Penulis, 2020